MENGGALAKKAN EKSPOR BUAH-BUAHAN TROPIKA : Salah Satu Alternatif Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia

Oleh : Dr.Ir. Bunasor Sanim, M.Sc.
(Pembantu Rektor II IPB dan Dosen Fakultas Pertanian dan Pasca Sarjana, IPB.)

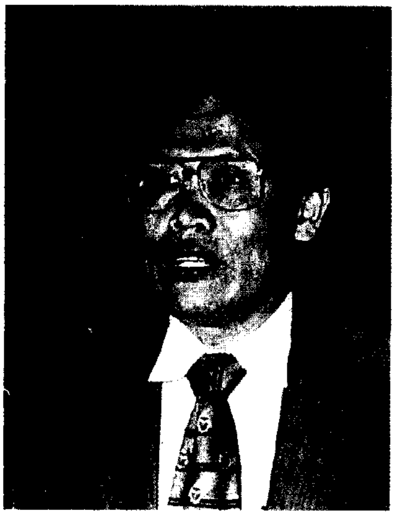

Pendahuluan

Pembangunan pertanian termasuk agribisnis/agroindustri di Indonesia selama PJP I tidak diberikan dukungan penuh. Buktinya bahwa PJP I pedesaan, yang di dominasi oleh pertanian, mengalami pemiskinan-pemiskinan (Habibie, 1998). Hal ini terjadi karena investasi diorientasikan pada industrialisasi di perkotaan-perkotaan, sehingga terjadi jurang ekonomi dan sosial yang dalam antar sektor pertanian-industri, antar wilayah pedesaan-perkotaan, dan kawasan barat-timur Indonesia. Terlihat sekali di sini adalah keinginan pemerintah untuk segera diakui sebagai negara industri, sehingga berakibat hutang luar negeri lebih dari 100 milyar dolar, DSR lebih dari 35 % dan defisit neraca berjalan mencapai USS 8 milyar. Pembangunan pangan, sandang, papan belum rampung, sudah merambah dunia industri, bahkan industri berat dengan teknologi canggih. Akibatnya sumberdaya manusia tidak tersedia, proses alih teknologi tidak terjadi, industri yang dikembangkan tidak memiliki *backward linkage*, berkembang karena proteksi pemerintah dengan alasan *infant industries*, dan besar dari *captive market*. Padahal hampir semua industri hanya dinikmati oleh kurang lebih 250 pengusaha besar yang tidak memungkinkan terjadinya *trickle down effect*.

> **Korupsi, kolusi, nepotisme dan arogansi kekuasaan menimbulkan munculnya "*rent seeker*" dan "*free rider*" dalam aktivitas ekonomi yang pada gilirannya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Namun, anehnya gejala ini ditanggapi oleh pemerintah dengan tidak serius, dan bahkan membela diri dengan dalil fundamental ekonomi masih tetap kuat.**

Di bawah ini penulis akan uraikan proses jatuhnya perekonomian Indonesia, tahap proses pembangunan yang seharusnya dilalui oleh bangsa ini, dan bagaimana posisi agribisnis sebagai agenda paling penting pasca krisis ekonomi.

Anatomi Struktur Ekonomi Sebelum dan Sesudah Krisis

Sebelum terjadinya krisis sebetulnya kita telah mengetahui bahwa performansi/kinerja "fundamental makro ekonomi" kita tidak baik/rapuh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut yakni (Bunasor, 1998a), **pertama,** surplus neraca perdagangan yang tipis dan dari komponen barang yang diimpor didominasi oleh "*consumption goods*" bukan "*capital goods*". **Kedua,** necara berjalan (*current account*) yang defisit pada sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 1992 defisit neraca perdagangan baru mencapai US$ 4,0 milyar, pada awal tahun 1997 telah mencapai lebih dari US$ 8 milyar. **Ketiga,** cadangan devisa yang menipis berkisar US$ 18 milyar yang hanya cukup untuk membiayai impor selama 5 bulan. **Keempat,** angka *debt service ratio* (DSR) 35 % yang telah melampuai keamanan (20 %). **Kelima,** terkosentrasinya aset nasional pada kelompok kecil (250 konglomerat) yang menguasai sebesar kurang lebih 70%, sedangkan pengusaha kecil dengan 36 juta pada tahun 1996 hanya memiliki aset berkisar 8%.

Keenam, terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan arogansi kekuasaan menimbulkan munculnya "*rent seeker*" dan "*free rider*" dalam aktivitas ekonomi yang pada gilirannya menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (*high cost economy*). Namun, anehnya gejala ini ditanggapi oleh pemerintah dengan tidak serius, dan bahkan membela diri dengan dalil fundamental ekonomi masih tetap kuat.

Keadaan yang tidak menentu itu terus berlanjut sehingga akibatnya muncul krisis ekonomi seperti sekarang ini. Dampak dari krisis itu adalah **pertama,** inflasi yang tadinya satu digit (lebih kecil dari 10%), akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok (Sembako), mengalami peningkatan menjadi 20% sampai bulan Maret 1998 dan dalam revisi APBN 1997/1998 diasumsikan inflasi sebesar 20 %. Lantas kemudian ada kesepakatan baru dengan IMF inflasi diasumsikan menjadi 17 %. Kita tentu mendengar berita di Televisi bahwa sudah ada masyarakat pedesaan di daerah Bengkulu yang kesulitan pangan, sehingga harus mengkonsumsi singkong bersama cabe yang dicampurkan dengan garam. **Kedua,** pendapatan awal perkapita yang pada awal tahun 1997 berkisar sebesar US$ 1150, namun akibat krisis ekonomi turun menjadi US$ 330 pada awal tahun 1998, sehingga Indonesia kembali menjadi kategori negara miskin. **Ketiga,** pertumbuhan ekonomi yang semula 7,6 % pada tahun 1997, akhirnya pertumbuhan diasumsikan menjadi 0 % dalam revisi APBN 1997/1998 (hasil kesepakan Indonesia-IMF tahap I). Bahkan, pada kesepakatan berikutnya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan menjadi negatif 4 %. **Keempat**, nilai tukar rupiah yang anjlok sampai mencapai angka 1 US$ = Rp 15.000, menyebabkan dunia usaha mengalami kejatuhan dan investasi menjadi sulit dikembangkan karena sebagian besar industri kita, terutama industri manufaktur menggunakan kandungan bahan-bahan impor dari luar yang cukup besar yang semuanya menggunakan alat pembayar US$. Ditambah lagi L/C (*letter of credit*) impor Indonesia tidak diakui oleh perbankan luar negeri. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat tajam. Angka pengangguran awal tahun 1998 telah mencapai 8,6 juta orang yang terdiri dari angkatan kerja baru 2,7 juta orang, pengangguran tahun-tahun sebelumnya (*carry over*) sebesar 4,4 juta orang dan akibat PHK 1,5 juta orang. Bahkan jumlah pengangguran saat sekarang diperkirakan telah mencapai 13 juta orang (Bunasor, 1998). Di Jawa saja pengangguran buruh di sektor kontruksi saat ini mencapai 950.000 orang. **Kelima**, utang luar negeri baik swasta maupun nasional semakin membengkak yang sampai saat ini mencapai US$ 137,42 milyar, yang terdiri dari utang swasta US$ 73,96 milyar dan utang pemerintah (termasuk BUMN) sebesar US$ 63,64 milyar. **Keenam,** angka kemiskinan yang tadinya sudah turun dan mencapai angka 11,4 % (22 juta) dari total penduduk sekarang meningkat tajam. **Ketujuh,** kondisi dunia perbankan kita banyak yang tidak sehat, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibatnya, banyak bank yang mengalami kredit macet dan bahkan terjadi kolusi dan korupsi di tubuh perbankan tersebut. Sampai April 1998 jumlah kredit bermasalah mencapai Rp 32,29 trilyun (9,23 % dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 349,77 trilyun). Sejumlah Rp 10,23 trilyun dari jumlah total adalah kredit macet.

Berdasarkan data faktual di atas, maka disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia di akhir PJP I ini adalah struktur perekonomian yang rapuh yang berarti bahwa kinerja fumdamental makro ekonomi tidaklah kuat, sehingga tidak mungkin menghasilkan sebuah bangunan ekonomi yang kokoh. Apalagi jika dihadapkan pada tantangan-tantangan besar yang akan segera muncul seperti pasar bebas regional AFTA pada tahun 2003, APEC tahun 2010, dan WTO tahun 2020. Dengan bangun perekonomian semacam PJP I ini, dipastikan Indonesia akan semakin menderita dan tidak bisa bersaing. Hal ini jauh berbeda keadaanya apabila kita mencermati indikator ekonomi kita sebelum krisis seperti tercantum pada Tabel 1.

Harus diakui bahwa hasil pembangunan selama PJP I yang sangat signifikan adalah terjadinya transformasi struktur ekonomi Indonesia dari sektor pertanian ke industri. Sektor pertanian yang di awal PJP I memegang peran 43,6 persen sementara industri adalah 9,4 persen namun pada tahun 1995 pertanian *relative share*-nya dalam pembentukan PDB menjadi hanya 17 persen sedangkan sektor industri 58,7%. Parameter ini sebagian mempercayai bahwa tidak lama lagi Indonesia akan bersanding dengan negara-negara industri baru Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Taiwan.

Namun demikian ada beberapa parameter lain yang kurang diperhatikan dalam optimisme dinamika pembangunan PJP I tersebut, yaitu profil mikro ekonomi sektor riil, kesenjangan antar sektor, wilayah dan golongan, keterserapan sumberdaya manusia dalam pembangunan nasional. Profil riil mikro ekonomi yang dipercaya di dominasi oleh industri, jika diteliti secara mendalam ternyata tidak menunjukan bangunan wajah industrialisasi yang sebenarnya, tetapi berwajah representasi perdagangan yang lain. Harapan besar akan hadirnya sebuah kekuatan yang mampu memberikan nilai tambah atas sumberdaya alam

Tabel 1. Indikator Ekonomi Indonesia Sebelum Krisis

No.	Uraian	1995	1996	1997 (1)
1.	Nilai Produk Domestik Bruto (Rp milyar)	383.767,8	413.769,0	415.837,8
2.	Pertumbuhan ekonomi (%) (Produk Domestik Bruto/PDB, 1993 = 100)	8,2	7,9	5
4.	Tingkat Pengangguran (%)	2,6	2,6	2,7
5.	Ekspor barang (US$ juta)	47.454	50.188	12.962 (2)
6.	Impor barang (US$ juta)	40.921	44.240	12.525 (2)
7.	Transaksi berjalan (US$ juta) (% PDB)	-6.760 4.06	-7.801 4,49	-2.302 (2) 8,58 (3)
8.	Cadangan Devisa (US$)	14,67	19,12	19,87 (2)
9.	Nilai APBN (Rp trilyun)	78,02	90,61	101,06
10.	PMDN (Rp trilyun)	69,85	100,71	110,78 (1)
11.	PMA (Rp trilyun)	19,08	22,93	32,92 (1)
12.	Inflasi (%) • Indeks Harga Konsumen (4) • Indeks Harga Perdagangan Besar (5)	 1,65 1,01	 2,04 -	 6,88 -

Sumber : Majalah PILAR Edisi Januari-Februari 1998

Keterangan :

1. Perkiraan
2. Triwulan 1
3. Atas dasar perkiraan defisit neraca transaksi berjalan 1997 = US$ 9.789 juta
4. Januari-Desember 1997 = 11,05
5. Januari-Oktober 1997 = 12,69

dengan sendirinya juga merupakan utopia saja. Ini diperlihatkan secara jelas dalam krisis moneter tahun 1997-1998 ini.

Ilustrasi berikut akan memberikan gambaran dari industri-industri seperti dimaksud di atas antara lain adalah industri mie instant yang dimiliki seorang konglomerat paling besar di Indonesia. Industri ini hampir seratus persen tidak ada nilai tambah yang diberikan, dan hampir tidak ada keterkaitan dengan industrinya, karena bahan baku berupa terigu berasal dari impor, termasuk rancang bangun mesin dan teknologi pengolahannya. Oleh karena itu yang dilakukan industri tersebut adalah tidak lebih dari proses semacam pencampuran atau asembling saja. Demikian halnya yang terjadi dalam industri mobil. Akibatnya dalam waktu kurang lebih 30 tahun, proses transfer/alih teknologi dapat dikatakan tidak terjadi sama sekali. Hal ini terlihat dari target pemenuhan kandungan lokal lebih dari 50 persen bagi industri mobil itu sangat sulit dicapai. Padahal industri ini bukan sebuah industri yang sangat rumit. Hal yang sama terjadi pada industri lainnya seperti industri tekstil dan garmen memiliki komponen impornya sebesar 97 % (dalam bentuk kapas dan serat buatan). Angka-angka tersebut untuk industri obat-obatan berkisar 80 %, industri pakan (ternak dan ikan) tidak kurang dari 80 %, industri otomotif dan elektronik mencapai lebih dari 70 % (Bunasor, 1998a).

Ada beberapa parameter lain yang kurang diperhatikan dalam optimisme dinamika pembangunan PJP I tersebut, yaitu profil mikro ekonomi sektor riil, kesenjangan antar sektor, wilayah dan golongan, keterserapan sumberdaya manusia dalam pembangunan nasional

Industi-industri lainnya pun tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas. Hal ini disebabkan industri di Indonesia bersembunyi dibalik kekuatan proteksi, monopoli/oligopoli, kartel, tender tertutup yang menjamurkan praktek *rent seeking*, yang kesemuanya dilegalkan oleh pemerintah.

Bila dilihat dari sisi pandang kepentingan pihak eksternal industrialisasi di Indonesia, maka menjadi bagian dari strategi *multi national company* untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Hal ini terjadi karena industri-industri *multi national company* tadi di negara asalnya tidak mampu lagi beroperasi lebih efisien dan efektif, karena kenaikan upah untuk karyawan dan tuntutan proses produksi yang nir-polusi dan limbah. Sehingga, tidak mengherankan jika industri di Indonesia sangat besar sekali kandungan impornya.

Munculnya kesenjangan antar sektor, wilayah, dan golongan juga akibat dari industralisasi yang salah arah itu, karena bagaimanapun bentuk industri sudah menjadi kelaziman bahwa keberadaannya di pusat-pusat kota secara otomatis tidak akan memberikan kesempatan bagi berputarnya uang (*money velocity*) secara merata di tiap wilayah, sektor, dan golongan. Akumulasi dari kesenjangan-kesenjangan ini tidak terlalu lama akan berbalik menjadi disintegrasi yang berimplikasi pada kegiatan-kegiatan yang sangat kontra produktif.

Ketidak terserapan SDM pada industrialisasi juga merupakan keniscayaan akibat dari industrialisasi tadi. Industri-industri yang sangat padat kapital dan teknologi tidak mungkin dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Inilah yang kemudian menimbulkan jumlah pengangguran yang tinggi. Di samping memang indeks mutu pengembangan sumberdaya manusia (*Human Development Index = HDI*) Indonesia (berkisar 155) juga tertinggal dibanding negara-negara tetangga lainnya (Malaysia, Pilipina,, lebih-lebih Singapura), apalagi jika dibandingkan dengan negara industri maju yakni negara kelompok tujuh yang HDI-nya sudah mencapai lebih besar dari 170. *Human Development Report* tahun 1997 menempatkan posisi Indonesia pada urutan ke 99.

Berangkat dari pengalaman pahit (krisis moneter dengan segala akibatnya) praktek industrialisasi semu harus digantikan dengan industrialisasi baru yang merupakan wujud sejati dari industrialisasi. Dan format inilah yang seyogyanya akan diterapkan pasca krisis ekonomi yang juga awal dari PJP II.

Keharusan Pengembangan Agribisnis ?

Setelah kejatuhan pengusaha Indonesia di tengah bencana ekonomi, krisis moneter, masa kebangkitan pengusaha-pengusaha itu sulit sekali diprediksikan bentuk dan waktunya. Jika pengusaha itu mengalami kepailitan, maka otomatis diwajibkan untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban, terutama utang luar negerinya. Belum lagi jika dilihat dari aspek kepercayaan--karena dalam bisnis salah satu kuncinya adalah kepercayaan--pengusaha yang telah jatuh sulit sekali mendapatkan kepercayaan.

Oleh karena itu pada masa mendatang pengusaha yang akan mewarnai perekonomian Indonesia adalah pengusaha baru dan sebagian pengusaha lama yang lolos dari krisis (yang diperkirakan hanya mencapai kurang dari 50 %). Sektor yang sebaiknya mereka masuki dan dikembangkan bersama-sama dengan program pemerintah adalah sektor pertanian khususnya agribisnis & agroindustri. Beberapa alasan yang mendukungnya adalah :

Pertama, agribisnis/agroindustri umumnya bersifat *resources based industry* dan beraneka sumberdaya pertanian secara alami (*endowment factor*). Dengan demikian sektor ini dapat dikatakan lebih menjamin perdagangan yang lebih kompetitif dan memberikan nilai tambah. Tabel 2 dibawah ini menggambarkan nilai tambah (*added value*) per sektor pertanian dibandingkan sektor jasa dan industri di negara-negara Asia termasuk Indonesia yang nilai tambahnya masih menunjukan nilai yang rendah.

Kedua, sektor agribisnis dan agroindustri mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang sangat besar (*backward and foward linkages*). Dengan besarnya keterkaitan ke depan dan kebelakang tadi, agribisnis/agroindustri dapat memberikan dampak yang secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian nasional, terutama terhadap peningkatan nilai ekspor hasil pertanian dan penambahan devisa. Data tahun 1996 menunjukan bahwa ada 4 jenis buah-buahan yang di ekspor Indonesia dengan nilai tertinggi adalah (i) pisang (*fresh*) sebesar US$ 19,278,202; (ii) nenas (*fesh and dried*) sebesar US$ 6,905,065; (iii) Tamarind (*dried*) sebesar US$ 2,11,560 dan (iv) Manggis sebesar US$ 1,523,770. Tabel 3 di bawah ini menunjukan nilai ekspor buah-buahan Indonesia dari tahun 1992-1996.

Tabel 2. ***Value Added*** **(Nilai tambah) per Sektor di Negara-Negara Asia**

Negara	Pertanian		Industri		Jasa	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
Korsel	1,0	1,0	6,9	7,4	6,5	7,2
Singapura	5,0	5,0	7,9	9,5	7,3	7,1
Taiwan	1,4	0,8	3,7	4,9	8,0	7,5
Cina	4,5	4,5	11,1	9,2	8,0	8,0
Indonesia	2,6	2,6	10,4	10,1	7,5	7,4
Malaysia	1,4	1,4	10,4	9,4	8,5	9,5
Thailand	3,0	3,1	7,5	8,0	5,5	6,0

Sumber: Majalah Agribisnis Asia Pasifik, 1998

Keterangan : Angka tahun 1998 adalah estimasi

Tabel 3. Nilai Ekspor Buah-Buahan Indonesia Tahun 1992-1996

ahun	Nilai Ekspor Buah-Buahan (US$ Ribu)	
	Segar/Dikeringka	Diawetkan
1992	53,197.9	50,427.7
1993	62,156.5	51,887.7
1994	92,697.5	49,182.6
1995	70,388.9	50,790.4
1996	105,626.7	95,648.7

Sumber : BPIIP Deperindag, 1997

Ketiga, di era globalisasi perubahan selera konsumen terhadap barang-barang konsumsi pangan diramalkan akan berubah menjadi cepat saji dan pasar untuk produksi hasil pertanian, diramalkan pula terjadi pergeseran dari pasar tradisional menjadi pasar moderen. Dengan demikian, agribisnis dan agroindustri menjadi kegiatan bisnis yang atraktif.

Keempat, produk agribisnis/agroindustri umumnya mempunyai elastisitas tinggi, sehingga makin tinggi pendapatan seseorang makin terbuka pasar bagi produk agribisnis/agroindustri.

Kelima, agribisnis/agroindustri umumnya menggunakan input yang bersifat *renewable*, sehingga pengembangannya tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi dapat menghindari pengurangan sumberdaya, sehingga lebih menjamin *sustainability*. **Keenam**, teknologi agribisnis/agroindustri sangat fleksibel sehingga dapat

Tabel 4. Volume dan Nilai Impor dan Ekspor Buah-buahan dan Olahannya di Indonesia tahun 1991 - 1995

Tahun	Impor		Ekspor	
	Volume (ton)	Nilai (US$ 1000)	Volume (ton)	Nilai (US$ 1000)
1991	22.818,5	18,067,6	71.272,6	50.800,8
1992	46.836,9	38,551.4	82.888,9	54,686.3
1993	75.842,9	58,315.7	135.390,0	59,905.2
1994	88.991,5	71,797.8	144.313,0	61,202.4
1995	83.601,0	62,714,3	99.884,3	37.260,6

Sumber : Direktorat Jendral Tanaman Pangan & Hortikultura, 1996
Data tahun 1995 sampai dengan bulan Agustus.

dikembangkan dalam padat modal ataupun padat tenaga kerja, dari manajemen sederhana sampai yang moderen, dan dari skala kecil (*agro-home industry*) sampai skala besar (*business enterprise scale*). Data Deperindag tahun 1997 menunjukan bahwa nilai ekspor produk andalan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari sektor agribisnis dan agroindustri adalah (i) ikan kering, asin/dalam air garam sebesar US$ 36.127 ribu; (ii) patung dan perhiasan dari kayu sebesar US$ 29.796 ribu; (iii) barang anyaman dari rotan sebesar US$ 26.173 ribu dan ;(iv) minyak atsiri sebesar US$ 26.173 ribu. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia yang besar merupakan pasar potensial bagi produk agribisnis khususnya pangan. Bunasor dan Latif (1997) menyatakan bahwa pada saat ini 9 dari 15 kota di dunia mempunyai jumlah penduduk di atas 10 juta (megapolitan) berada di atas Asia. Sementara pada tahun 2015 diperkirakan 15 dari 27 kota-kota megapolitan berada di Asia, bahkan 8 diantaranya berpenduduk lebih dari 20 juta termasuk diantaranya Jakrta, Tokyo, Shanghai dan Beijing.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam era pasca krisis ekonomi ini kebijaksanaan pengembangan agribisnis menjadi "pilihan utama" yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini disebabkan usaha peningkatan kesempatan kerja, peningkatan ekspor, pertumbuhan, pemerataan, pengentasan kemiskinan dan ketahan nasional dapat terjamin, oleh adanya plihan kebijaksanaan tersebut.

Peluang Sektor Agribisnis Khususnya Buah-Buahan

Pilihan utama untuk pengembangan usaha dalam sektor agribisnia pasca krisis ekonomi dalam menopang perekonomian nasional sudah menjadi "keharusan". Peluang di sektor ini cukup besar seperti komoditas buah-buahan dan sayuran, perkebunan (kelapa sawit, karet) dan perikanan (ikan segar, dingin, diasapi maupun digarami). Dalam kondisi krisis ekonomi seperti saat ini, misalnya komoditi buah-buah tropika menjadi kompetitif dari segi harga, karena buah impor menjadi mahal akibat kurs rupiah dalam US$ tadi. Memang selama ini ekspor buah-buahan kita hanya meningkat sebesar US$ 61 juta pada tahun 1994, sementara impor buah-buahan meningkat dari US$ 2,5 juta pada tahun 1989 menjadi US $ 72 juta pada tahun 1994. Padahal komoditi ini memiliki keunggulan kompetitif karena buah-buahan tropika asal Indonesia adalah buah tropis yang bentuk dan rasanya "*exotic*" dan jenisnya beraneka ragam. Perkembangan ekspor dan impor buah-buahan disajikan pada Tabel 4 di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir nilai ekspor buah-buahan Indonesia terus menurun, sebaliknya impornya terus meningkat, sehingga menimbulkan neraca perdagangan yang defisit (*deficit balance of trade*). Situasi demikian sangat ironis, karena Indonesia mempunyai potensi besar dalam sumberdaya buah-buahan tropika.

Lebih rinci lagi laju pertumbuhan nilai ekspor beberapa komoditi buah-buahan menurun misalnya manggis, durian, ramhutan, duku, dan alpokat seperti terlihat pada Tabel 5.

Dari sisi permintaan komoditi buah-buahan di dalam negeri sendiri menunjukan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran pada tahun 1988 konsumsi buah-buahan sebesar 26,52 kg per kapita dan tahun 1992 meningkat menjadi 27,40 kg serta tahun 1996 diperkirakan meningkat lagi menjadi

Tabel 5. Pekembangan Nilai Ekspor Buah-buahan Indonesia

Komoditi	Tahun			Pertumbuhan (%)
	1992	1993	1994	1995
Mangga	857.158	586.123	935.864	1.311.728
Manggis	2.143.969	1.120.433	2.484.246	2.688.666
Pisang	17.554	3.300.686	5.820.934	8.690.749
Durian	190.220	273.700	125.833	38.181
Nenas Kaleng	47.003.993	49.702.467	46.228.810	46.373.478
Ramhutan	414.343	285.196	425.996	2.724
Duku	36.748	24.501	33.487	2.724
Alpokat	14.334	2.586	1.482	3.999
Pepaya	8.335	1.629	225	1.055
Total	50.686.654	55.297.321	56.065.877	59.521.307

Sumber : BPS, diolah oleh Binus TPH, 1997 dalam Ato Suprapto (1997)

Tabel 6. Peningkatan Permintaan Komoditi Hortikultura Tahun 1993-1997

Produk	USA (%)	KANADA (%)	MEE (%)
Mangga	8 12	25 6	104 3
Melon	70 2	31 3	69
Pepaya	35 7	-	100 4
Pisang	41 5	19 7	85
Jambu Mete	64 3	18 8	60
Bawang Merah	55 4	49 1	11
Biji-bijian	4 13	27 5	30
Brokolo	26 8	15 9	38
Bawang putih	15 11	34 2	180 2
Nenas	21 9	-4	95
Asparagus	0	-5	34
Tomat	0	28 4	256 1
Pasta	40 6	-	72
Krisan	16 10	15 9	24
Anggrek	93 (1)	-	12

Sumber : Regional Agribusiness Project (1995) dalam Bisnis Indonesia 14 November 1995

Tabel 7. Tarif Efektif Komoditas Hortikultura di Negara Maju

Negara	Sayur-Sayuran (%)		Buah-Buahan (%)	
MEE	6,7	15,1	7,7	16,6
Jepang	9,0	17,5	21,5	21,8
USA	7,6	11,0	1,1	20.3
Negara Industri lainnya	0,1-14,0	5,7-14,6		

Sumber : Islam (1990)

30 kg/kapita/tahun. Sementara itu permintaan komoditi hortukultura di pasar internasional, baik buah-buahan maupun sayuran tahun 1993-1997 cukup besar seperti di sajikan pada Tabel 6.

Namun, dalam ekspor komoditi hortikultura di pasar internasional tidak lepas dari hambatan tarif terutama di negara maju. Besarnya tarif efektif komoditi hortikultura di negara maju disajikan seperti Tabel 7.

Walaupun terdapat hambatan dalam kebijaksanaan tarif dalam perdagangan komoditi hortikultura, namun permintaan dunia terhadap komoditi ini tetap tinggi. Hal ini disebabkan **pertama**, tingginya upah buruh di negara maju, sehingga menjadi penyebab ditinggalkannya usaha pertanian dan beralih ke usaha industri. **Kedua,** kecenderungan masyarakat dunia untuk mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga kesehatan. **Ketiga**, meningkatnya jumlah penduduk etnis yang tinggal di negara maju, membawa serta makanan tradisional dari negara asalnya, termasuk buah-buahan. **Keempat**, meningkatnya usaha promosi yang dilakukan negara produsen. Perkiraan impor buah-buahan beberapa negara pasar utama pada tahun 2000 disajikan pada Tabel 8.

Kebijakasanaan Menggalakkan Ekpor Komoditi Buah-Buahan Tropika

Dari potensi sumberdaya buah-buahan tropika yang sangat besar, Indonesia belum mampu memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya untuk menjadi sumber pendapatan khususnya dalam memperoleh devisa *(foreign exchange earning)*. Ini dapat dikaji dari data empiris ekspor, dimana pendapatan devisa Indonesia per tahun jauh lebih kecil dibandingkan dengan Thailand dan Philipina yang sumberdaya alam yang mereka miliki relatif miskin.

Pada Tabel 9 dan 10 tersebut memberikan bukti kuat bahwa kemampuan Thailand dan Philipina dalam penetrasi pasar internasional dalam buah-buahan jauh lebih handal dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai ilustrasi; pada tahun 1991 ekspor buah-buahan dan sayuran Indonesia hanya bernilai US$ 223,21 juta, sedangkan untuk Philipina (khususnya buah-buahan) dan Thailand masing-masing US$ 437,60 juta dan US$ 811,94 juta. Hal yang lebih menarik dari tabel 10 adalah bahwa jenis buah-buahan tropis yang sangat umum terdapat di Indonesia dan bahkan keragamannya lebih besar.

Untuk menyiasati peningkatan ekspor komoditi

Tabel 8. Perkiraan Impor Buah-Buahan beberapa Negara Pasar Utama Tahun 2000 (Metric ton)

Jenis Buah	USA		Kanada		MEE		Asia
	Sekarang	2000	Sekarang	2000	Sekarang	2000	Sekarang
Mangga	110.000	120.000	15.000	18.702	79.000	161.533	50.632
Melon	430.000	733.000	191.600	251.829	686.829	1.163.813	175.588
Pepaya	14.200	19.189	-	-	10.845	21.705	26.791
Nenas	-	-	-	-	-	-	123.863 a)
Pisang	3.500.000	4.929.000	383.100	424.200	4.895.000	9.041.663	345.000
Nenas Kaleng	342.000	413.000	36.400	35.000	409.154	797.550	150.418

Catatan : a) Japan Fresh
Sumber : Market Asia Volume I Isue November-Desember 1994

Tabel 9. Nilai Ekspor Buah-Buahan dan Sayuran Thailand tahun 1992-1994 (Juta Rupiah)

Tahun	Buah-Buahan		Sayuran		Jumlah (Juta Rp)	Jumlah (US$)
	Segar	Kaleng & Proses	Segar	Kaleng & Proses		
1992	130.393	1.161.336	126.160	287.180	1.705.069	811,94
1993	146.910	1.064.890	131.140	267.675	1.610.615	766,96
1994	161.850	1.105.560	144.420	270.082	1.681.912	800,91

Sumber : Bunasor s. (1996, IPB hal. 10) Potensi dan Prospek Agribisnis di Indonesia, LPSDM

hortikultura yang berasal dari buah-buahan tropika Indonesia di pasar internasional, maka diperlukan beberapa kebijakan yang strategis yakni **pertama,** meningkatkan daya saing global (*global competitive*) komoditi buah-buah tropika yang mencakup dua macam keunggulan yaitu keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dari prod ık tersebut.

Menurut Bunasor (1994) keunggulan komparatif lebih bersifat mikro menggambarkan tingkat efisiensi dan efektifitas proses berproduksi pada level perusahaan secara individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain; (a) teknologi yang digunakan dalam budidaya dan pasca panen dari komoditi buah-buahan tersebut. Teknologi untuk pengembangan buah-buahan ini terutama berkaitan dengan teknologi pembibitan misalnya melalui proses rekayasa genetika (bioteknologi) seperti teknologi kultur jaringan (b) manajemen usahanya dari harus diarahkan pada sistem manajemen modern yakni *Quality Standard Management System* untuk mampu memenuhi kualitas standar produk buah-buahan harus diperdagangkan di pasar internasional. Secara menyeluruh dari bahan pasokan, kegiatan prossing sampai distribusinya dimana salah satu komponennya adalah aspek lingkungan. Pada aspek ini dikenal *Environmental Quality Management System* (ISO 14000) yang komponen utamanya menyangkut *natural resources degradation* dan *human health degradation;* (c) pengembangan usaha untuk komoditi buah-buahan ini harus dalam skala yang ekonomis dan besar (*economic scale and scope*). Skala usaha yang demikian akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dalam penyediaan komditi buah-buahan yang akan diekspor. Oleh karena jangan sampai terjadi kevakuman dimana *demand* dari pasar cukup tinggi sementara *supply*-nya rendah, akibat produksinya dalam skala yang tidak ekonomis. (d) adanya jaminan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas yang akan berkiprah (terutama karyawan) dalam kegiatan agribisnis buah-buahan tropika ini. Kualitas SDM yang diperlukan dalam konteks ini harus memiliki jiwa "*entrepreneurship* " yang handal dan "*business like*" yang mumpuni. Untuk dapat secara berkelanjutan bersaing SDM tersebut harus memenuhi tiga kriteria yakni (i) *multi skill*; (ii) *life-long education* dan ; (iii) *learning by doing process* sehingga terjadi peningkatan kualitas SDM berlanjut. Pada tingkatan pemerintahan daerah (*local goverment*) yang nantinya menjadi pusat/lokasi pengembangan komoditi buah-buahan ini, maka implementasi dari otonomi (desentralisasi) merupakan prasyarat penting bagi tercapainya program ini. Hal ini harus dijamin oleh kemampuan yang handal dari tenaga administrasi dalam arti luas (perencanaan dan pelaksanaan) yang disebut *local goverment capability* dari pemerintah daerah setempat agar memiliki kapasitas membangun (*building capasity*). Bahkan David Osborne menyebutkan bahwa pelaku pemerintahan/kalangan birokrat dalam kontek daerah maupun negara harus memiliki jiwa kewirausahaan yang disebutnya sebagai

Tabel 10. Ekspor Buah-Buahan Philipina tahun 1991

No	JENIS	VOLUME (Kg)	NILAI (US$)
1	Pisang	869.233.756	156.952.695
2	Keripik Pisang	12.710.855	14.512.431
3	Nenas Diawetkan	176.780.672	86.573.771
4	Nenas Segar	157.049.421	25.167.534
5	Sari Juice Nenas	38.986.017	24.434.852
6	Mangga	20.974.196	22.960.191
7	Sari Mangga	3.980.163	4298434
8	Mangga Dikeringkan	548.614	3645863
9	Juice Mangga	2.722.257	3.066.329
10	Mangga Beku	256.478	735.407
11	Kelapa Muda	1.914.992	1.105.017
12	Semangka	5.905.823	968.340
13	Macapuno	375.615	867.303
14	Pepaya	1.880.747	805.997
15	Kolang-kaling	235.905	471.542
16	Nangka	192.223	409.048
	Lain-lain	169.962.128	82.728.621
	JUMLAH	1.496.387.555	429.703.375

Sumber: **Statistic Office of Philipines dalam Bunasor, S, 1996. Potensi dan Prospek Agribisnis Indonesia, LPSDM-IPB**, 1996, hal 11

Tabel 11. Daftar Penolakan Impor Produk Pangan Ke Amerika Serikat, Tahun 1995

No.	Jenis Komoditi Pangan	Kasus	Nilai (US$)
1.	Whole grain, milled products	1	1,780.00
2.	Bakery products	2	2,180.00
3.	Macaroni and noodle products	2	125,408.00
4.	Snack food items	2	10,945.00
5.	Fishery seafood products	102	17,580,738.00
6.	Fruits and fruits products	3	0,122.00
7.	Nuts and edible seeds	1	2,047.00
8.	Vegetables and vegetables products	3	198,086.00
9.	Vegetables and vegetables products	5	110,910.00
10.	Spices, flavors and salts	2	342,291.00
11.	Coffee and tea	22	945,462.00
12.	Candy W/O Chocolate	2	30,308.00
13.	Chocolate and cocoa products	514	86,642,747.00
14.	Gelatin, rennet, pudding mixes	1	7,728.00
15.	Multi food dinners	2	3,668.00
16.	Soups	4	752.00
17.	Misc. food related items	5	9,616.00
			100,020,797.00

Sumber: Tim Inter Departemen Bappenas (1996)

entrepreneurial beureucratic. Sedangkan keunggulan kompetitif lebih bersifat makro/agregat yang terjadi pada tingkat regional atau nasional. Variabel yang menentukan adalah (a) adanya keterkaitan industri (*industrial linkages*) yang kuat antara industri buah-buahan dengan misalnya industri pengalengan buah, industri pengemasan (*packaging*) dan industri jasa pemasaran lainnya. Dalam kaitan dengan masalah keterkaitan antar industri, Bunasor (1997) menyebutkan perlunya koordinasi horisontal dan vertikal antara industri hulu dan hilir untuk dapat menciptakan suatu manajemen rantai dalam industrinya. Sehingga diharapkan dapat terciptanya suatu struktur industri yang tangguh yang dikenal dengan istilah "*Horizontal and Vertical Coordination on Agroindustrial Chain Management*". ; (b) dukungan sistem pendidikan nasional yang mendukung kebutuhan kerja khususnya di sektor swasta seperti swasta yang bergerak dalam industri maupun perkebunan buah-buahan; (c) ketersediaan jaringan infrastruktur yang memadai yang meliputi jaringan transportasi dan komunikasi yang mendukung ekspor buah-buahan. dan ; (d) kebijaksanaan pemerintah yang kondusif yang menciptakan kondisi yang *favourable* bagi bisnis dalam sektor agribisnis buah-buahan ini.

Kedua, meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa (*flows of good and service*) dengan membangun sistem jaringan distribusi (*delivery system*) yang efisien dan efektif untuk menjamin kelancaran ekspor buah-buahan tropika Indonesia. Dukungan infrastruktur seperti jaringan transportasi, kelancaran birokrasi perizinan dari pengadaan *cargo* dan lain-lain menjadi prasyarat yang diperlukan untuk mengurangi biaya pasca pabrik (*post factory cost*).

Ketiga, mengurangi atau menghilangkan distorsi/gangguan pasar, sehingga tercipta pasar yang sehat. Jangan sampai dalam upaya peningkatn ekspor buah-buahan tropika Indonesia ini akan menciptakan lagi struktur pasar yang monopoli-monopsoni, duopoli-duopsoni dan oligopoli-oligopsoni. Oleh karena itu dukungan regulasi yang kuat yaitu dengan adanya undang-undang anti monopoli (*anti trust*). Sementara itu terdapat peraturan daerah yang menghambat perdagangan antar daerah (*inter regional trade*) lebih-lebih untuk perdagangan pasar internasional.

Keempat, peningkatan mutu meliputi (a) manajemen mutu terpadu (*total quality management* =TQM) dan (b) harmonisasi sistem standar nasional. Dalam manajemen mutu terpadu diperlukan "*good practices*" seperti "*good agricultural practices* (GAP), *good harvesting practices* (GHP) dan *good marketing practices* (GMP). Untuk tujuan harmonisasi standar, *national standard Indonesia* (NSI) perlu sesuai dan harmonis (*compatible*) dengan standar internasional misalnya dengan ISO, *Codex Alementarius Commission* (CAC), *International office Of Epizootics* (IOE) dan *Association Francaise de Normalisation* (AFNOR). Secara garis besar upaya peningkatan mutu sangat berkait dengan mengatasi hambatan tarif (*tariff barrier*) dan non tarif (*non tariff barrier*), utamanya ISO 9000 (*quality standard management system*), ISO 14000 (*environmental quality management system*) yang menyangkut "*Technical Trade Barrier*" (TTB) dan perjanjian *sanitary* dan *phyto sanitary*.

Kelima, membentuk sistem informasi manajemen (*management information system* = MIS) dan jaringan kerjasama (*net working*) untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dalam mencermati proses pemasaran buah-buahan baik pada tingkat nasional, regional dan internasional melalui pengumpulan dan analisis data *market information* dan *market intelligent*. Jaringan kerjasama tidak hanya dilakukan antar pengekspor tetapi juga dengan pihak negara pengimpor buah-buahan.

Keenam,. dukungan kelembagaan. Kelembagaan yang diperlukan dalam pengembangan agribisnis hortikultura khususnya komoditi buah-buahan tropik meliputi (1) kerjasama antar pelaku bisnis (sinergi tripartit) dalam unsur Perguruan Tinggi/Balai Penelitian sebagai motivator dan inovator, pemerintah pusat maupun lokal sebagai facilitator dan regulator dan pihak dunia usaha itu sendiri sebagai user dan fasilitator juga, (2) pengembangan kebijaksanaan (peraturan dan ketentuan) yang berkaitan dengan perdagangan buah-buahan yang lebih bersifat pemberian kemudahan *(facilitating)* daripada bersifat pembatasan *(regulating)*; (3) menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi (KISS) antar pelaku pembangunan yang berkiprah dalam perdagangan/ekspor buah-buahan; dan (4) perlunya pengembangan partisipasi masyarakat dan sinergi kerjasama untuk mencapai keberhasilan kegiatan ekspor buah-buahan. Model aksi pendekatan peran serta masyarakat ini disebut *participation action approach model* (PAAM) yang cukup berhasil diterapkan di negara-negara berkembang untuk pelestarian sumberdaya alam plasma nutfah, biodiversity termasuk buah-buahan tropika ini. Aspek kelembagaan yang berkaitan langsung dengan pembinaan ekspor bagi pengusaha kecil dan menengah termasuk ekspor buah-buahan adalah Dewan Penunjang Ekspor (DPE). Dewan ini mulanya di bawah Departemen Perdagangan, yang kemudian dengan bersatunya Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Deperindag, maka lembaga ini sekarang di bawah Deperindag. Fungsi yang diemban lembaga ini adalah untuk membantu meningkatkan daya saing barang ekspor non migas (termasuk buah-buahan tropika) dalam pemasaran internasional dan menejemen produksi. Dewan ini akan berperan dalam (i) pemberian bantaun teknis pemasaran ekspor; (ii) bantuan teknis produksi dan manajemen; (iii) bantun konsultasi dan bimbingan; dan (vi) pembinaan terpadu ekportir usaha kecil dan menengah dan Koperasi. Agar pembinaan ini dapat berjalan dengan baik, maka DPE perlu membentuk Forum kerjasama antar instansi terkait, BUMN, lembaga bisnis, maupun perusahan swasta. Model seperti ini telah dikembangkan di Thailand dengan nama **Talad Thai,** dengan motto "Jual beli nyaman, barang lengkap, mutu tinggi", mampu mendongkrak ekspor hortikultura Thailand termasuk buah-buahan tropikanya.

Belajar Pengalaman Dari "*Fail Story*" Ekspor Produk Pangan Ke Amerika Serikat.

Pengalaman berharga ini terjadi adanya daftar penolakan impor produk pangan ke Amerika Serikat pada tahun 1995 (Tabel 11).

Dari cerita kegagalan tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa untuk dapat menggalakkan ekspor perlu peningkatan kualitas SDM termasuk moral dan ethik berbisnis, teknologi dan kedisiplinan dalam prosesing dan penanganannya serta masalah kualitas pengolahan yang baik

Dalam satu tahun (1995) kasus penolakan impor produk pangan Indonesia sebanyak 763 dengan urutan sebagai berikut ; 514 kasus penolakan pada "*Chocolate* and *Cocoa Products*", 102 kasus pada "*fishery seafood products* dan 22 kasus pada mata dagangan "*coffee* and *tea*".

Cerita dibalik penolakan impor tersebut disebabkan oleh salah satu alasan kombinasi dari tiga faktor-faktor berikut ; (a) masalah kontaminasi ; produk yang diekspor dalam pengolahan dan penanganannya (*handling* dan *packaging*), tidak bersih, sehingga menyebabkan terjadinya kontaminasi oleh mikroba yang menyebabkan kerusakan fatal pada komponen utama produk tersebut, misalnya busuk, berubah warna dan sebagainya; (b) masalah penipuan (*cheating*); faktor moral dan ethik bisnis yang belum baik, menyebabkan banyak kasus penipuan oleh para eksportir, misalnya dalam perjanjian/MOU kualitas yang diekspor adalah "*high grade*" (HG), pada pengiriman berikutnya "*medium grade*" (MG); (c) masalah pengemasan (*packaging*); permasalahan timbul karena tidak kuatnya bahan, bahan pengemasan dapat bersenyawa dengan produk sehingga menimbulkan keracunan dan juga kelengkapan label, misalnya rincian kandungan nutrisinya, lemak, protein, karbohidrat dan lain-lain. Dari cerita kegagalan tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa untuk dapat menggalakkan ekspor perlu peningkatan kualitas SDM termasuk moral dan ethik berbisnis, teknologi dan kedisiplinan dalam prosesing dan penanganannya serta masalah kualitas pengolahan yang baik. Lebih hebat lagi dirasakan oleh Indonesia kasus penolakan dalam eksport tersebut dapat diklasifikasikan pada kategori "*automatic ditention*" atau "*total rejection*" yang berarti untuk dapat diterima kembali transaksi ekspor tersebut, perlu adanya pembaharuan kesepakatan. Hal ini memerlukan waktu lama dan upaya yang besar yaitu berhubungan dengan "*food and drug Authority*" (FDA)

Penutup

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini menyebabkan pengembangan usaha yang selama ini mengandalkan produk yang berasal dari kandungan impor terutama industri menjadi lumpuh. Oleh karena itu pengembangan usaha dengan penggunaan bahan bakunya dari kandungan lokal (strategi pengembangan *resource based industry*) menjadi alternatif yang sangat urgen saat ini. Salah satu dari usaha tersebut adalah upaya pengembangan agribisnis melalui penggalakkan ekspor buah-buahan tropika karena Indonesia memiliki sumberdaya buah-buahan tropika yang sangat potensial. Upaya ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Untuk mencapai sukses dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut enam langkah kongkrit perlu diimplementasikan sekaligus belajar dari pengalaman "*fail story*" ekspor tahun 1995.

DAFTAR PUSTAKA

_____, 1997 Prosiding Diskusi : Upaya Pengembangan Ekspor Komoditi Buah-buahan Indonesia. Institut Pertanian Bogor dan PT Mekar Unggul Sari (tidak dipublikasikan)

Bunasor, S, 1997a. Potensi dan Prospek Agribisnis di Indonesia. Materi Training Perencana Daerah (Bappeda) di UI, Jakarta.

Bunasor, S, 1997b. *Vertical Coordinator on Agroindustrial Change Management in Indonesia. Paper Presented at International Congress of International Agribusiness and Management Association* (IAMA). Jakarta, May 23 - 26 1997.

Bunasor, S. 1998a. Kegoncangan Moneter dan Hikmah Shaum Ramadhan. Makalah Dipresentasikan dalam acara Halal Bi Halal, Faperta, IPB Bogor, Maret 1998.

Bunasor, S. 1998b. Ketangguhan Agribisnis Dalam Menghadapi Gejolak Perekonomian. Jurnal Tiga Bulanan, AFKAR, CIDES. Vol. IV No. 4. Tahun 1998.

Bunasor, S. dan Latief M. Muchtar, 1998. Kebijaksanaan Pembangunan Agribisnis yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelajutan. Makalah Dipresentasikan dalam Acara Diskusi Ilmiah STIKUBANG, Semarang, Maret 1998.

Habibie, B.J., 1998. Pedesaan Mengalami Pemiskinan. Liputan dari Koran Harian Umum Kompas

Majalah PILAR, 1998. Politik & Rekayasa Pasar. Edisi Nomor 4 Tahun 1/25 Februari 1998

Rahardjo, M.D, (ed), 1997. Pembangunan Ekonomi Nasional. Suatu Pendekatan Pemerataan, Keadilan dan Ekonomi Kerakyatan. Kumpulan Tulisan dalam memperingati 74 tahun H. Ahmad Tirtosudiro.